

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE INDUSTRI BARANG KONSUMSI

Alvin Hartantio dan Estralita Trisnawati

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: alvinhartantio@gmail.com

Abstract: *The purpose of research is to obtain about the impact of capital intensity and political connection towards tax avoidance on manufacture companies in the goods and consumption industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012-2018. This study used 196 samples of manufacture companies in the industrial sector of goods and consumption base on purposive sampling method. The data used are secondary data in the form of financial statements. The analysis model was tested using SPSS software version 25 and SmartPLS version 3.3.2. The results showed that capital intensity have no positive and significant effect on tax avoidance and political connections have no connections have no positive and significant effect toward tax avoidance. For further research are expected to adding other independent variables, and not use purposive sampling techniques.*

Keywords: *Capital Intensity, Political Connection, Tax Avoidance, The Goods & Consumption Industry.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai pengaruh intensitas modal dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018. Penelitian ini menggunakan 196 sampel perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi berdasarkan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Model analisis yang diuji menggunakan *software SPSS* versi 25 dan *SmartPLS* versi 3.3.2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen, serta tidak menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*.

Kata kunci: Intensitas Modal, Koneksi Politik *Tax Avoidance*, Industri Barang dan Konsumsi.

LATAR BELAKANG

Suatu negara Indonesia maju pasti memiliki arah dalam pembentukan negara. Sebagai negara Indonesia merdeka pajak merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara dalam perekonomian Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal ayat 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

Pendapatan negara juga merupakan sumber pemasukan negara yang digunakan pembiayaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Penerimaan atau pendapatan negara adalah salah satu bagian strategis dan sangat penting dalam struktur APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara), dimana mempunyai peran sebagai sumber pendapatan pemerintah, mengurangi pembiayaan belanja negara, dan defisit anggaran (Hidayat, 2014).

Tabel 1
Jumlah Anggaran Belanja Negara Indonesia periode 2012-2019 dalam Triliun Rupiah

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Negara	1.435,5	1.683,0	1.842,5	2.039,5	2.095,7	2.080,5	2.220,7	2.461,1

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja Negara Indonesia periode 2012-2019 mengalami kenaikan presentase tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2017 anggaran belanja Negara Indonesia mengalami penurunan sebesar 15,2 triliun rupiah atau sekitar 1% kemungkinan hal tersebut dapat dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat menurun dan lemahnya nilai tukar mata uang pada tahun tersebut.

Tabel 2
Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Indonesia Periode 2012-2019 dalam Triliun Rupiah

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.032,6	1.193,0	1.280,4	1.380,0	1.546,7	1.498,9	1.618,1	1.786,4
Penerimaan Negara Bukan Pajak	278,0	332,2	385,4	410,3	273,8	250,0	275,4	378,3
Penerimaan Hibah	0,8	4,5	1,4	3,3	2,0	1,4	1,2	0,4
Pendapatan Negara	1.311,4	1.529,7	1.667,2	1.793,6	1.822,5	1.750,3	1.894,7	2.165,1

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan APBN Indonesia menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja negara terhadap jumlah anggaran pendapatan negara pada periode 2012-2019 mengalami defisit tiap tahunnya secara berturut-turut. Pada tahun 2019 sebesar 296 triliun rupiah, tahun 2018 sebesar 326 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 330,2 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 273,2 triliun rupiah, tahun 2015 sebesar 245,9 triliun rupiah, tahun 2014 sebesar 175,3 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 153,3 triliun rupiah, dan tahun 2012 sebesar 124,1 triliun rupiah. Kemungkinan penerimaan pajak masih kecil dan masih belum mencapai target maka masih banyaknya wajib pajak yang melawan melakukan praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance (acceptable) merupakan tindakan yang diperbolehkan tetapi adanya *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan peraturan akan membuat penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih belum mencapai target, namun untuk penerimaan negara bukan pajak, bea dan cukai, serta hibah telah melebihi target yang ditentukan sehingga dapat menutupi kekurangan penerimaan pajak (Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2019).

Fenomena tentang *tax avoidance* di Indonesia ditemukan kasus perlambatan setoran dari perusahaan manufaktur penerimaan pajak mengalami penurunan (Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2019). BPS (Badan Pusat Statistik) dan *IHS Markit* mencatat pada kuartal III/2019 rata-rata *PMI (Purchasing Manager Index)* manufaktur Indonesia berada pada angka 49,2. *PMI (Purchasing Manager Index)* manufaktur Indonesia kembali menurun ke angka 49,2

pada oktober 2019. Pelambatan setoran dari perusahaan manufaktur sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur selama 9 bulan terakhir. Dengan total kontribusi ke penerimaan pajak, hampir mendeteksi 29,2% kinerja manufaktur justru berkontraksi hingga minus 3,2%. Padahal tahun lalu, penerimaan dari sektor manufaktur tumbuh pada 11,7%, *IHS Markit* menilai bahwa dalam beberapa bulan terakhir hingga oktober 2019 permintaan baru terus menurun dengan tidak adanya permintaan yang tinggi dengan laju penurunan terbesar sejak dimulainya tahun 2015. (sumber:www.ekonomi.bisnis.com)

Faktor-faktor yang telah dilakukan penelitian sebelumnya dari kedua variabel. Penelitian pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* oleh Novriyanti & Dalam (2020), Pattiastina, Tammububua, Numberi, Patiran, & Temalagi (2019), Sonia & Suparmun (2018), Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), Irianto, Sudibyo, & Wafirli (2017), Dwilopa (2016). Selanjutnya, penelitian pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* oleh Apsari & Supadmi (2018), Aminah, Chairina, & Sari (2017), Ferdiawan & Firmansyah (2017), Purwanti & Sugiarti (2017), Dharma & Ardiana (2016), Hijrani, Latifah, & Setyawan (2014). Pada penelitian sebelumnya banyak perbedaan hasil penelitian sehingga, penulis tertarik dalam mengkaji ulang terutama pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi periode 2012-2018 yang terdapat di Indonesia selain itu peneliti termotivasi untuk meneliti praktik *tax avoidance* yang adanya kaitan dengan pendapatan negara, terutama penerimaan pajak yang masih belum maksimal dari tahun ke tahunnya.

KAJIAN TEORI

Teori keagenan atau *agency theory* mendeskripsikan teori agensi sebagai penghubung antara *agent* dan *principal*. *Agent* merupakan pihak yang dipercayai oleh pemilik perusahaan untuk mengelola dan membuat segala keputusan yang tepat dan optimal dan menguntungkan bagi *principal* itu sendiri, juga untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Jensen and Meckling, 1976).

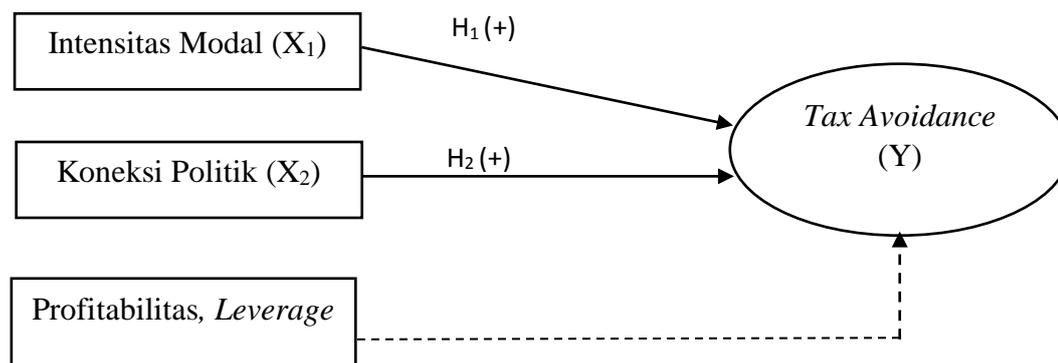
Intensitas Modal. Intensitas modal seberapa besar perusahaan menginvestasikan asset tetap yang merupakan salah satu kekayaan perusahaan. Perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan dimana hampir semua asset tetap dapat mengalami penyusutan yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri hal tersebut (Dwilopa, 2016).

Koneksi Politik. Perusahaan melakukan koneksi politik merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah. Hubungan istimewa yang diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) (Pranoto & Widagdo, 2016).

Tax Avoidance adalah pengaturan transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum pajak. Cara ini biasaya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum pajak sehingga tidak termasuk perbuatan melanggar hukum (Chandra & Trisnawati, 2019)

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

H₂: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

METODOLOGI

Objek penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan dilakukannya pengujian statistika dengan berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh dari BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2012-2018. Objek penelitian ini adalah intensitas modal dan koneksi politik dengan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yang metode ini diperlukan pemilihan sampel berdasarkan karakteristik yang ditetapkan. Penelitian ini terdapat tiga jenis variabel yang akan diteliti, yakni variabel independen intensitas modal dan koneksi politik, variabel dependen *tax avoidance*, dan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage*. Pada penelitian ini sumber data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini didapatkan melalui media www.sahamok.com dan www.idx.co.id. *Tax avoidance* dengan lima indikator rasio pengukuran *BBM (Benchmarking Behavioral Model)* sesuai dengan (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor Se-40/PJ/12), terdapat rasio input dan rasio aktivitas luar usaha, yaitu rasio gaji (*g*), rasio penyusutan (*py*), rasio sewa (*s*) selain itu rasio aktivitas luar usaha, yaitu rasio penghasilan luar usaha (*pl*), rasio biaya luar usaha (*bl*).

Variabel operasional terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen, variabel kontrol, dan variabel independen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat mengendalikan. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang menarik perhatian peneliti untuk di teliti lebih lanjut. Terdapat dua variabel independen yaitu intensitas modal dan koneksi politik, sedangkan variabel kontrol terdapat dua variabel profitabilitas dan *leverage*, dan variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*.

Tax avoidance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum dari urusan wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya. *Tax avoidance* diukur rasio *benchmarking* sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak (SE-40/PJ/2012), terdapat 5 ukuran dalam benchmarking yaitu:

1. Rasio Gaji terhadap Penjualan

$$g = \frac{\text{Jumlah Biaya Gaji pada tahun } t}{\text{Penjualan pada tahun } t}$$

2. Rasio Penyusutan terhadap Penjualan

$$py = \frac{\text{Jumlah Beban Penyusutan pada tahun } t}{\text{Penjualan pada tahun } t}$$
3. Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan

$$s = \frac{\text{Jumlah Beban Sewa pada tahun } t}{\text{Penjualan pada tahun } t}$$
4. Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan

$$pl = \frac{\text{Penghasilan Luar Usaha pada tahun } t}{\text{Penjualan pada tahun } t}$$
5. Biaya Luar Usaha terhadap Penjualan

$$bl = \frac{\text{Biaya Luar Usaha pada tahun } t}{\text{Penjualan pada tahun } t}$$

Intensitas modal sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan perhitungan *Capital Intensity Ratio (CIR)* menggambarkan seberapa besar asset perusahaan diinvestasikan dalam asset tetap. Rumus menghitung *CIR* adalah sebagai berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Net Fixed Asset}}{\text{Total Asset}}$$

Koneksi politik sebagai variabel independen diukur dengan menggunakan variabel dummy (KON) menggambarkan suatu perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan cara-cara tertentu untuk memiliki suatu hubungan secara politik atau usaha-usaha agar memiliki kedekatan dengan pemerintahan. Dengan keterangan adalah sebagai berikut:

Skor 0 : Tidak ada hubungan perusahaan dengan pemerintah

Skor 1 : Ada hubungan perusahaan pemerintah BUMN dengan kepemilikan saham > 10%

HASIL UJI STATISTIK

Pada penelitian ini uji statistik deskriptif data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini didapatkan melalui media www.sahamok.com dan www.idx.co.id. Nilai N pada uji statistik deskriptif merupakan banyaknya data yang digunakan, yaitu 196 sampel. Sampel variabel yang akan diteliti adalah rasio input dan rasio aktivitas luar usaha, yaitu rasio gaji (g) terhadap penjualan, rasio penyusutan (py) terhadap penjualan, rasio sewa (s) terhadap penjualan selain itu rasio aktivitas luar usaha, yaitu rasio penghasilan luar usaha (pl) terhadap penjualan, rasio biaya luar usaha (bl) terhadap penjualan sebagai variabel dependen, serta Intensitas modal (*CIR*) dan koneksi politik (KON) sebagai variabel dependennya.

Uji *Outer model*. Sebelum melakukan pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas konvegen, uji reliabilitas, dan uji validitas diskriminan. Dalam uji validitas konvergen, digunakan pengukuran *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*. Dalam pengujian *Outer loading* pada *SmartPLS* adalah > 0,7. Pada penelitian ini indikator g memiliki nilai 0,347, indikator s memiliki nilai 0,161, indikator bl memiliki nilai 0,357, dan indikator py memiliki nilai 0,692 yang artinya empat indikator tersebut tidak melewati pengukuran *outer loading* oleh karena itu rasio gaji (g) terhadap penjualan, rasio sewa (s) terhadap penjualan, rasio biaya luar usaha (bl) terhadap penjualan, dan rasio penghasilan luar usaha (pl) terhadap penjualan dihilangkan.

Uji *Inner model*. Pada tahap ini pada tahap pengujian *inner model*, akan dilakukan uji koefisien determinansi (R^2). Sama seperti linear R^2 *SmartPLS* bertujuan untuk menguji kemampuan konstruk eksogen menjelaskan variasi pada konstruk endogen. Ghazali (2015) mengungkapkan terdapat tiga kriteria nilai R^2 , yaitu 0,67 yang berarti kuat, 0,33 berarti moderat, dan 0,19 yang berarti lemah. Jadi apabila nilai R^2 mendekati angka satu maka

memiliki arti secara keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. R^2 adjusted sebesar 0,168. Hal ini berarti variabel intensitas modal dan koneksi politik sudah menjelaskan 16,8% terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian terdapat nilai sisanya sebesar 82,2% yang dijelaskan pada variabel lain dari luar hasil model regresi, seperti *good corporate governance*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility*, perbedaan permanen, perbedaan temporer, perbedaan tarif pajak asing, kerugian pajak.

Uji Hipotesis. Dalam pengujian hipotesis mengungkapkan pengukuran *path coefficient*, nilai pada *t-statistik* harus memiliki nilai $> 1,64$ sedangkan nilai *p-value* harus memiliki nilai $< 0,05$.

Tabel 3
Hasil Uji Bootstrapping dengan Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T-statistics (O/STDEV)</i>	<i>P-Values</i>
Intensitas modal terhadap <i>tax avoidance</i>	0.048	0.064	0.063	0.768	0.443
Koneksi politik terhadap <i>tax avoidance</i>	0.010	-0.001	0.036	0.271	0.786

Sumber: Hasil pengelolaan *SmartPLS (Smart Partial Least Square)* versi 3.3.2.

Berdasarkan uji yang dilakukan dengan dengan melakukan uji model *PLS bootstrapping* dan hasil dari uji *path coefficient* maka, terdapat hasil yang disajikan untuk hipotesis pada penelitian ini. Pada pengujian *one tailed* untuk alpha ($\alpha > 0,05$), nilai *t-statistik* sebesar 1,64 dan nilai *p-values* $< 0,05$. Dengan demikian nilai *t-statistik* dan *p-values* harus memenuhi uji syarat agar hipotesis dapat diterima. Jika syarat tidak terpenuhi, maka terdapat hasil hipotesis ditolak jika tidak memenuhi. Dari tabel hipotesis 1 Intensitas modal, hipotesis 2 koneksi politik, dan variabel kontrol profitabilitas dan *leverage* akan dilakukan uji *one tailed*.

Pada hipotesis dalam penelitian ini pengujian intensitas modal (*CIR*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebesar 0,048, nilai *t-statistik* 0,768, dan *p-values* 0,443. Pada pengujian nilai *t-statistik* dari variabel intensitas modal sebesar 0,768 lebih kecil dari pada 1,64 dan nilai *p-values* sebesar 0,443 lebih besar dari 0,05. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung pada penelitian ini (H_1 ditolak). Artinya semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi aktivitas dari praktik *tax avoidance*. Pada penelitian ini H_1 yang menyatakan bahwa “Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

Pada pengujian selanjutnya hipotesis ini koneksi politik (*KON*) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebesar 0,010, nilai *t-statistik* 0,271, dan *p-values* 0,786. Pada pengujian nilai *t-statistik* dari variabel koneksi politik sebesar 0,271 lebih kecil dari 1,64 dan nilai *p-values* sebesar 0,786 lebih besar dari 0,05. Hasil pada tabel menunjukkan bahwa hipotesis ini tidak didukung pada penelitian ini (H_2 ditolak). Artinya semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi aktivitas dari praktik *tax avoidance*. Pada penelitian ini H_2 yang menyatakan bahwa “Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

DISKUSI

Berdasarkan hasil pengelolaan uji sebelumnya *path coefficient* yang telah dilakukan, nilai *t-statistik* intensitas modal terhadap *tax avoidance* memiliki nilai sebesar 0,768 dan nilai

p-values 0,443. Dari tabel yang telah disajikan nilai *t-statistik* tidak melebihi nilai dari nilai *t-tabel* dengan nilai sebesar 1,64 dan nilai dari *p-values* tidak lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji *t-statistik* menunjukkan bahwa variabel dengan uji *t-statistik* menunjukkan bahwa variabel intensitas modal tidak memiliki berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras atau sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Novriyanti & Dalam (2020), Pattiastina, Tammububua, Numberi, Patiran, & Temalagi (2019), Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), dan Aminah, Chairina & Sari (2017) dengan mengemukakan bahwa dalam penggunaan intensitas modal tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya banyaknya intensitas modal pada suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi tindakan praktik *tax avoidance*. Intensitas modal yang tinggi yang digunakan perusahaan biasanya hanya untuk melakukan investasi dan operasional, maka dari itu intensitas modal yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini dikonfirmasi teori agensi bahwa *principal* memiliki tanggung jawab dalam mengelola perusahaan terhadap pihak manajemen, maka dari itu manajemen wajib mempertanggung jawabkan kepada pihak *principal*. Sehingga tindakan dari praktik *tax avoidance* membuat citra perusahaan menjadi buruk.

Hasil penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonia & Suparmun (2018) dan Irianto, Sudiby, & Wafirli (2017) dengan mengemukakan bahwa dalam penggunaan intensitas modal terdapat pengaruh *tax avoidance*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dikarenakan dalam penggunaan indikator atau pengukuran atas *tax avoidance* penelitian sebelumnya menggunakan *ETR (Effective Tax Rate)* dan sampel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah sample laporan keuangan yang belum diaudit selain itu penggunaan kriteria sampel perusahaan yang hanya mengalami laba.

Selanjutnya berdasarkan penelitian sebelumnya yang didukung oleh Novriyanti & Dalam (2020), Pattiastina, Tammububua, Numberi, Patiran, & Temalagi (2019), Maulana, Marwa, & Wahyudi (2018), dan Aminah, Chairina, & Sari (2017) dapat membuktikan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Apabila penggunaan sampel dalam penelitian bukan hanya menggunakan sampel perusahaan yang mengalami laba dan indikator atau pengukuran *tax avoidance* maka dapat membuktikan adanya hubungan tersebut secara empiris.

Berdasarkan hasil pengelolaan uji sebelumnya *path coefficient* yang telah dilakukan, nilai *t-statistik* koneksi politik terhadap *tax avoidance* memiliki nilai sebesar 0,271 dan nilai *p-values* 0,786. Dari tabel yang telah disajikan nilai *t-statistik* tidak melebihi nilai dari nilai *t-tabel* dengan nilai sebesar 1,64 dan nilai *p-values* tidak lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji *t-statistik* menunjukkan bahwa variabel dengan uji *t-statistik* menunjukkan bahwa variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini selaras atau sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Apsari & Supadmi (2018), Purwanti & Sugiarti (2017), Dharma & Ardiana (2016), dan Hijrani, Latifah, & Setyawan (2016) dengan mengemukakan bahwa adanya hubungan koneksi politik tidak ada pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya adanya hubungan koneksi politik pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan praktik *tax avoidance*. Artinya perusahaan bisa mendapatkan suatu manfaat dari hubungan kedekatan dengan pemerintah, namun hal tersebut harus dipikirkan juga karena berdampak kepada jangka panjang yang ditimbulkan. Dampak jangka Panjang menurunnya kepercayaan investor, kepercayaan masyarakat, dan perusahaan mengalami kerugian. Perusahaan cenderung

berkurang daya perhatian masyarakat untuk melakukan investasi karena memiliki citra atas hubungan tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2019), Aminah, Chairina, dan Sari (2017), dan Ferdiawan & Firmansyah (2017) dengan mengemukakan bahwa dalam adanya hubungan koneksi politik terdapat pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dikarenakan dalam penggunaan indikator atau pengukuran atas *tax avoidance* penelitian sebelumnya menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dan sampel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah laporan keuangan yang belum diaudit selain itu penggunaan kriteria sampel perusahaan yang hanya mengalami laba.

Selanjutnya berdasarkan penelitian sebelumnya yang didukung oleh Apsari & Supadmi (2018), Purwanti & Sugiarti (2017), Dharma & Ardiana (2016), dan Hijrani, Latifah, & Setyawan (2016) dapat membuktikan bahwa adanya hubungan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Apabila penggunaan sampel dalam penelitian bukan hanya menggunakan sampel perusahaan yang mengalami laba dan indikator atau pengukuran *tax avoidance* maka dapat membuktikan adanya hubungan tersebut secara empiris.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian data dalam penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan lain: (1) Populasi pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian hanya pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang hanya melakukan intensitas modal dan koneksi politik. (2) Pada variabel koneksi politik hanya melihat perusahaan yang tidak memiliki hubungan seperti BUMN dan melihat kepemilikan saham pemerintah. Selain itu hanya memakai laporan keuangan. (3) Jumlah pengamatan yang dilakukan sangat sedikit sehingga mempengaruhi ketepatan hasil pada penelitian ini. (4) Pengetahuan, waktu dan *human error* dari peneliti sehingga hasil yang didapatkan kurang valid. (5) Pada indikator pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan *BBM (Benchmarking Behavioral Model)*.

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam dalam penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Penelitian ini diolah alat uji terbaru di masa peneliti melakukan penelitian sehingga untuk penelitian berikutnya mungkin ada ada uji lain tambahan dan alat uji. (2) Penelitian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan untuk perusahaan manufaktur selain sektor industri barang dan konsumsi. Untuk koneksi politik indikator dummy bisa ditambahkan seperti pengalaman kerja terhadap pemerintah yang ditujukan kepada direktur, komisaris, dewan direksi, dan komite audit dan terdapat hubungan politisi yang merupakan memiliki hubungan dengan partai politik. (3) Penelitian selanjutnya melakukan penambahan pada variabel-variabel terkait, yaitu variabel independen, variabel kontrol dan dependen yang belum terdapat pada penelitian ini. (4) Indikator pengukuran selain *BBM (Benchmarking Behavioral Model)* dalam mengukur *tax avoidance*, yaitu selain rasio gaji (*g*), rasio penyusutan (*py*), rasio sewa (*s*), rasio penghasilan luar usaha (*pl*), dan rasio biaya luar usaha (*bl*). *ETR (Effective Tax Rate)* dan indikator lainnya. (5) Penelitian selanjutnya disarankan agar tidak menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, pada penelitian ini hanya memakai kriteria yang bukan merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2019). Political Connection, Profitability, and Capital Intensity Against Tax Avoidance in Coal Companies on the Indonesia Stock Exchange. *Advances in Social, Education and Humanities Research*, 431.
- Aminah, Chairina, & Sari. (2017). The Influence of Company Size Fixed, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 2.
- Apsari, A. A. (2018). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Koneksi Politik, dan Capital Intensity pada Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi*, 25.
- Chandra, W., & Trisnawati Estralita. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kebijakan Dividen Tunai Dimoderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1, 956-963.
- Dharma, I. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 584-613.
- Dwilopa, D. E. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *repository umy*, 9.
- Irianto, B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 33-41.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure* (Vol. 3). Journal of Financial Economics.
- Pranoto, B., & Widagdo, A. K. (2013). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggresiveness. *Seminar Nasional 3rd Call for Syariah Paper*, 472--486.
- SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR SE- 40/PJ/2012 TENTANG PEMBUATAN BENCHMARKING BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTANNYA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Summarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3 Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal ayat 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- <http://bumn.go.id>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020)
- <http://ekonomibisnis.com>. (Diakses tanggal 7 May 2020)
- <http://kemenkeu.go.id/apbnkita>. (Diakses tanggal 14 Januari 2020)